

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Basah, Syachran. *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan Dalam Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Sebuah Tanda Mata 70 Tahun Ateng Syarifudin*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Basuki, Sunaryo. *Hukum Agraria (Diktat Ajar)*, 2007.
- Haar BZN, Ter. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1981.
- Hadjon, Philipus M dan kawan-kawan. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994.
- Handoyo, Hestu C. *Aspek-aspek Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Ruang*, Yogyakarta : Unika Atmajaya, 1995.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Malik, Abdul. *Sejarah Adat Indonesia*, Jakarta : Bina Cipta, 1983.
- Parlindungan, A.P. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Polak, Mayor dalam R. Soeprapto. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Jakarta : CV. Mitra Sari, 1986.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1976.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Sodiki, Achmad. *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*, Jakarta : Arena Hukum, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1989.

Sudiyat, Iman. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1982.

Suhendro. *Status Hukum Produk Dinas Pertanahan*, Suara Merdeka, Semarang : 28 Juni 2001.

Talkulputra, Nad Darga. *Urgensi Penatagunaan Tanah Sebagai Pelaksanaan Penataan Ruang, Dalam Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Aspek Pertanahan Dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Penerbit CIDES, 1996.

Tamara, Subekti. *Himpunan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*.

Wiranata, I Gede. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya Masa ke Masa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

## II. Makalah

Bahari, Syaiful. *Landreform di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya ke Depan*. Makalah pada Seminar Nasional Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat : BPN, HKTI, *Chatolic Relief Services*, Jakarta, 24-25 Agustus 2004.

Harsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI Nomor IX Tahun 2001*. Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan Pembaruan Agraria : STPN, Yogyakarta, 16 Juli 2002.

## III. Artikel

Pemerintah Daerah DKI Jakarta, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang*, Publikasi Penerangan Rencana Kota, Jakarta : 2000.

## IV. Surat Kabar

Harian Poskota, *1500 Vila Liar Rusak Resapan Air*, 31 Oktober 2009.

## V. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah*, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur*, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen*, Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003.

*Kitab Undang Undang Hukum Perdata [burgerlijk wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.